



KANTOR KECAMATAN
RAJAPOLAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN RAJAPOLAH**

Jl. Raya Rajapolah No. 220 Telp/Fax (0265) 421291 Tasikmalaya 46155

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Inayah-Nya sehingga Kecamatan Rajapolah Kabupaten Rajapolah telah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Rajapolah Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Rajapolah adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rajapolah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Rajapolah Tahun Anggaran 2025 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Kecamatan Rajapolah sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rajapolah.

Kami menyadari bahwa Renja ini belum sempurna, sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Namun demikian kami berharap Renja Kecamatan Rajapolah Tahun Anggaran 2025 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Rajapolah, Nopember 2024
Camat Rajapolah,

AGUNG NURBUDHIANSYAH, S.Sos.
Pembina/IV.a
NIP. 19760816 200604 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 3

 1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra
 7

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 23

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 25

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 27

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional36

 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan OPD 39

BAB V PENUTUP45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Rajapolah yaitu ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”*** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD pertahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Peraturan dan Perundang-undangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Rajapolah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025(Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
24. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2024 (30 Desember 2024) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun 2024 (30 Desember 2024) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;

- 27. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : /Kep. - Ekbang/2024, tentang Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
- 28. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : /Kep. /BPKPD/2024 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- 1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Rajapolah Tahun 2025;
- 2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/ kegiatan Kecamatan Rajapolah pada Tahun 2025.

1.3.1. Tujuan

- 1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Rajapolah Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.
- 2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- 3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Rajapolah dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Rajapolah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian renstra, Analisa Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Restra.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja, serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan OPD Tahun 2024.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja serta Pendanaan Kegiatan OPD

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan Umum Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu: **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Rajapolah pada tahun 2025 melaksanakan 2 Urusan yaitu;

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah
- 2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rajapolah

Kedua urusan OPD Kecamatan Rajapolah dijabarkan dalam 5 Program dan diimplementasikan dalam 10 Kegiatan. Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Rajapolah TA. 2024 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Rajapolah
Tahun Anggaran 2024

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENJA TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rajapolah	2.267.031.000	1.725.243.328	76,10
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.000.000	-	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000	-	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	-	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	1.510.500.000	1.523.133.328	100,84
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.510.500.000	1.523.133.328	100,84
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	5.000.000	-	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	-	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	146.695.000	65.059.200	44,35
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	82.000.000	31.006.200	37,81
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.500.000	6.600.000	101,54
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13.365.000	-	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.900.000	4.800.000	97,96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.430.000	22.653.000	156,99
Penyediaan Peralata Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga secara lengkap	25.500.000	-	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	124.600.000	-	0,00
Pengadaan Meubeler	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	70.000.000	-	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54.600.000	-	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.000.000	60.100.000	39,28

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17.500.000	13.900.000	79,43
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	67.750.000	46.200.000	68,19
	Jasa tenaga pengamanan	24.000.000	-	0,00
	Jumlah tenaga administrasi	40.500.000	-	0,00
	Jumlah tenaga Honorarium Pegawai Honorer Kategori II	3.250.000	-	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.236.000	76.950.800	25,63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82.120.000	66.750.800	81,28
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200.000.000	-	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	18.116.000	10.200.000	56,30
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	133.550.000	14.370.000	10,76
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rajapolah	42.500.000	14.370.000	33,81
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	32.500.000	14.370.000	44,22
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	-	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	55.500.000	15.000.000	27,03
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tingkat Kecamatan	15.000.000	-	0,00
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	25.500.000	15.000.000	58,82
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	-	0,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	35.550.000	20.900.000	58,79
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20.800.000		0,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14.750.000	20.900.000	141,69
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	26.000.000	-	0,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	26.000.000	-	0,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.000.000	-	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	88.500.000	65.700.000	74,24
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	88.500.000	65.700.000	74,24
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	-	0,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	76.500.000	65.700.000	85,88

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.000.000	25.000.000	22,52
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.000.000	25.000.000	22,52
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	26.000.000	25.000.000	96,15
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75.000.000	-	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	-	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	55.000.000	27.945.000	50,81
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	55.000.000	27.945.000	50,81
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.000.000	-	0,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.000.000	-	0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	12.730.000	127,30
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.000.000	-	0,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.000.000	15.215.000	169,06
JUMLAH		2.681.081.000	1.858.258.328	69,31

Berdasarkan tabel 2.1 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Rajapolah pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.858.258.328,-, atau sebesar 69,31 % dari total anggaran sebesar Rp. 2.681.081.000,-

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Rajapolah

PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (Rp)	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Jumlah Dana	Rp		12
			Waktu pelaksanaan Kegiatan	TA		
		Output	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/	12	
				Bulan		

		Outcome	Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	93,14
		Benefits	Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Kedinasan	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100
				%	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Dana	Rp.	Tersedia Dana	
		Input	Waktu pelaksanaan Kegiatan	TA		
		Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6
		Outcome	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12
		Benefits	Kenyamanan pegawai dalam bekerja/memberikan pelayanan kepada masyarakat	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100
			Jumlah Dana	Rp.		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Waktu pelaksanaan Kegiatan	TA		
		Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
		Outcome	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	%	100	100
		Benefits	Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Kedinasan	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input	Jumlah Dana	Rp. TA		
			Waktu pelaksanaan Kegiatan			
		Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12
		Outcome	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan	12	12
		Benefits	Tersedianya Bahan Bacaan	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya Kualitas wawasan Pegawai	%	100	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input	Jumlah Dana	Rp.		
			Waktu pelaksanaan Kegiatan	TA		
		Output	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12
		Outcome	Fasilitasi Kunjungan Tamu	%	100	100
		Benefits	Menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas dan kedinasan	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Dana	Rp. TA		
		Input	Waktu pelaksanaan Kegiatan			
		Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
		Outcome	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	100
		Benefits	Menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas dan kedinasan	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Jumlah Dana	Rp. TA		

			Waktu pelaksanaan Kegiatan			
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
		Outcome	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	%	100	96,38
		Benefits	Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan kedinasan	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Dana	Rp		
		Input	Waktu pelaksanaan Kegiatan	Bulan		
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
		Outcome	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	%	100	100
		Benefits	Terjaganya Pengamanan lingkungan gedung kantor	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input	Jumlah Dana	Rp. TA		
			Waktu Pelaksanaan kegiatan			
		Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10
		Outcome	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	%	100	99,75
		Benefits	Terpenuhnya kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaaraandinas / operasional kantor	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100
	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	Jumlah Dana	Rp.		
			Waktu pelaksanaan Kegiatan	TA		
		Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3
		Outcome	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	%	100	100
		Benefits	Menunjang Kelancaran Pelaksanaan tugas dan Penyelenggranaan pemerintahan	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Koordinasi Penyelenggaraa n Keg.Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Input	Jumlah Dana	Rp. TA		
			Waktu pelaksanaan Kegiatan			
		Output	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1
		Outcome	Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bulan	12	12
		Benefits	Pelaksanaan pembangunan di Desa akan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Kecamatan , Dinas terkait dan Pemerintah Desa	%	100	100
		Inpact	Pelaksanaan pembangunan di Desa akan lebih terkontrol baik keberhasilan maupun kekurangannya	%	100	100
Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Input	Jumlah Dana	Rp. TA		
			Waktu pelaksanaan Kegiatan			
		Output	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	

Daerah yang ada di Kecamatan		Outcome	Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
		Benefits	Pelaksanaan movev pelayanan publik di Desa akan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Kecamatan , Dinas terkait dan Pemerintah Desa	%	100	100
		Inpact	Pelaksanaan movev pelayanan publik di Desa akan lebih terkontrol baik keberhasilan maupun kekurangannya	%	100	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah Dana	Rp. TA		
		Input	Waktu pelaksanaan Kegiatan			
		Output	Jumlah Dokumen yang dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	2	2
		Outcome	Dokumen kegiatan yang Dilaksanakan	Bulan	12	12
		Benefits	Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pelayanan di Desa akan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Kecamatan , Dinas terkait dan Pemerintah Desa	%	100	100
		Inpact	Lebih tertibnya pelayanan yang ada di kecamatan	%	100	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Input	Jumlah Dana	Rp. TA		
			Waktu pelakasnaan Kegiatan			
		Output	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	5
		Outcome	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	%	100	99,24
		Benefits	Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintah	%	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Input	Jumlah Dana	Rp. TA		
			Waktu pelakasnaan Kegiatan			
		Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	20
		Outcome	Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	%	100	99,84
		Benefits	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan se Wilayah Kecamatan	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan di Wilayah Kecamatan Rajapolah	%	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dana	Rp. TA		
		Input	Waktu pelakasnaan Kegiatan			

Pengawasan Pemerintahan Desa		Output	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	12
		Outcome	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bulan	12	12
		Benefits	Terlaksananya Pembinaan Desa se Wilayah Kecamatan	%	100	100
		Inpact	Lebih tertibnya administrasi keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	%	100	100
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Input	Jumlah Dana	Rp. TA		
			Waktu pelakasnaan Kegiatan	Bulan		
		Output	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1
Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Input	Jumlah Dana	Rp. TA		
			Waktu pelaksanaan Kegiatan			
		Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	20
		Outcome	Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	%	100	99,84
		Benefits	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan se Wilayah Kecamatan	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan di Wilayah Kecamatan Rajapolah	%	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Input	Jumlah Dana	Rp. TA		
			Waktu pelaksanaan Kegiatan			
		Output	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	12
		Outcome	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bulan	12	12
		Benefits	Terlaksananya Pembinaan Desa se Wilayah Kecamatan	%	100	100
		Inpact	Lebih tertibnya administrasi keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	%	100	100
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Input	Jumlah Dana	Rp.		
			Waktu pelaksanaan Kegiatan	TA		

		Output	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1
		Outcome	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	%	100	100
		Benefits	Terlaksannya perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat	%	100	100
		Inpact	Meningkatnya kualitas hasil pembangunan yang dapat digunakan oleh Masyarakat	%	100	100

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kecamatan Rajapolah

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD s/d TAHUN 2024	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9))	11=(10/4)
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	12.692.251.548		0	1.725.243.328	0,00	0	1.725.243.328	0,14
7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		0		0,00		-	0,00
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.000.000		8.500.000		0,00	9.000.000	9.000.000	0,24
7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.000.000	-	5.000.000		0,00	5.500.000	5.500.000	0,24
7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000	-	5.000.000		0,00	5.500.000	5.500.000	0,24
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	-	0	0	1.523.133.328	#DIV/0!	0	1.523.133.328	0,00
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN penerima Gaji dan Tunjangan	8.557.387.298	1.257.443.659	1.510.000.000	1.523.133.328	1,01	1.510.500.000	4.291.076.987	0,50
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan					0,00		-	0,00
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis/diklat/sosialisasi/ workshop/diseminasi/capacity building	-	-	-		0,00	-	-	0,00
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	-				0,00		-	0,00
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	420.685.000	74.042.000	82.000.000	31.006.200	0,38	82.500.000	187.548.200	0,45

					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	37.996.000	4.498.000	6.500.000	6.600.000	1,02	7.000.000	18.098.000	0,48
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	70.367.500	8.496.500	13.365.000		0,00	13.865.000	22.361.500	0,32
7	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	31.400.000	4.400.000	4.900.000	4.800.000	0,98	5.400.000	14.600.000	0,46
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	88.580.000	13.930.000	14.430.000	22.653.000	1,57	14.930.000	51.513.000	0,58
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralata Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga secara lengkap	108.704.050	3.704.050	25.500.000		0,00	26.000.000	29.704.050	0,27
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	-				0,00		-	0,00
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	-	-	-		0,00	-	-	0,00
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	-	-	-		0,00	-	-	0,00
7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	70.000.000	-	70.000.000		0,00	-	-	0,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya 3 Unit Laptop Setwan dan 3 Unit Printer	64.600.000	54.600.000	-		0,00	10.000.000	64.600.000	1,00
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				0,00		-	0,00
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	103.800.000	17.000.000	17.500.000	13.900.000	0,79	18.000.000	48.900.000	0,47
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa cleaning service	10.200.000		1.800.000		0,00	2.300.000	2.300.000	0,23
						Jasa tenaga pengamanan	127.200.000	21.600.000	24.000.000	8.400.000	0,35	24.500.000	54.500.000	0,43
						Jumlah tenaga administrasi	226.200.000	35.300.000	40.500.000	37.800.000	0,93	41.000.000	114.100.000	0,50
						Jumlah tenaga Honorarium Pegawai Honorer Kategori II	22.500.000	3.250.000	3.250.000		0,00	3.750.000	7.000.000	0,31
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					0,00		-	0,00
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tepat bayar pajak	486.508.500	77.838.500	82.120.000	66.750.800	0,81	82.620.000	227.209.300	0,47

					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	20.000.000	-	5.000.000		0,00		-	0,00
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung atau bangunan	105.945.000	17.616.000	106.445.000	10.200.000	0,10		27.816.000	0,26
						Rehabilitasi Gedung Kantor, Ruamah Dinas dan Pemasangan Saung Garasi	279.500.000		200.000.000		0,00	5.000.000	5.000.000	0,02
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	66.434.900			0,00	18.616.000	85.050.900	0,00
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	25.510.550			0,00	26.000.000	51.510.550	0,00
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	pelaksanaan rapat koordinasi rutin dan insidensial	183.510.550	25.510.550	32.500.000	14.370.000	0,44		39.880.550	0,22
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan pembinaan untuk Aparatur Desa/Kelompok Masyarakat	43.000.000		10.000.000		0,00		-	0,00
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		-	20.803.400			#DIV/0!	33.000.000	53.803.400	0,00
7	01	002	2.02	001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tingkat Kecamatan	63.000.000		15.000.000		0,00	10.500.000	10.500.000	0,17
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 dokumen SPM Desa, sasaran penerima SPM di Kec. Rajapolah	140.803.400	20.803.400	25.500.000	15.000.000	0,59	-	35.803.400	0,25
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		63.000.000		15.000.000		0,00	15.500.000	15.500.000	0,25
7	01	002	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		-				0,00	26.000.000	26.000.000	0,00
7	01	02	2.03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		-				0,00	15.500.000	15.500.000	0,00
7	01	02	2.03	002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta		-			20.900.000	0,00		20.900.000	0,00

7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		-	20.120.950			0,00	0	20.120.950	0,00
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha yang ada di kecamatan	126.620.950	20.120.950	20.800.000		0,00		20.120.950	0,16
7	01	002	2.04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		-				0,00		-	0,00
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		-				0,00	21.300.000	21.300.000	0,00
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	-				0,00		-	0,00
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-				0,00		-	0,00
7	01	003	2.01	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		-				0,00		-	0,00
7	01	003	2.01	002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		-				0,00		-	0,00
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-				0,00		-	0,00
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	-				0,00		-	0,00
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-				0,00		-	0,00
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-				0,00		-	0,00

7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam bagi 8 Desa di Kec. Rajapolah	460.991.800	75.991.800	76.500.000	65.700.000	0,86		141.691.800	0,31
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		-				0,00		-	0,00
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		-				0,00	77.000.000	77.000.000	0,00
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-				0,00		-	0,00
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		-				0,00		-	0,00
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Terlaksananya Kegiatan PHBN dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di 8 Desa Wilayah Kec. Rajapolah	179.151.500	29.151.500	30.500.000	25.000.000	0,82		54.151.500	0,30
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		-				#DIV/0!		-	0,00
7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		-				#DIV/0!	31.000.000	31.000.000	0,00
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	315.000.000	-	78.000.000		0,00		-	0,00
7	01	005	2.01	005	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-		0	0	0,00		-	0,00
7	01	005	2.01	006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila		-				0,00	78.500.000	78.500.000	0,00
7	01	005	2.01	007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		-				0,00		-	0,00

7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	33.600.000	-	8.400.000,0		0,00		-	0,00
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-				0,00	8.400.000,0	8.400.000	0,00
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tertibnya administrasi desa	65.000.000	10.000.000	10.500.000		0,00		10.000.000	0,15
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di 8 Desa	88.000.000	15.000.000	15.500.000	12.730.000	0,82		27.730.000	0,32
7	01	006	2.01	004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		-				0,00	11.000.000	11.000.000	0,00
7	01	006	2.01	005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		-				0,00	16.000.000	16.000.000	0,00
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01	007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01	008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01	010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01	011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		16.000.000	8.000.000	8.000.000	15.215.000	1,90		23.215.000	1,45

7	01	006	2.01	014	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01	015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01	016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01	017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		-				0,00		-	0,00
7	01	006	2.01	018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		-				0,00		-	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

OPD Kecamatan Rajapolah merupakan OPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Rajapolah, baik yang terkait dengan pelayanan Administrasi Surat Menyurat, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Rajapolah menyelenggarakan urusan yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah, dengan capaian indikator sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Rajapolah. Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan Kecamatan Rajapolah yaitu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rajapolah, dengan capaian indikator sebagai berikut:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rajapolah Pada tahun 2024, Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rajapolah yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Rajapolah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rajapolah Tasikmalaya

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Rajapolah		59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	
2	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Rajapolah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah		80,52	80,76	81,00	81,25	81,49	80,52	80,76	81,00	81,25	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rajapolah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rajapolah		81,73	82,20	82,76	83,15	83,80	81,73	82,20	82,76	83,15	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, OPD Kecamatan Rajapolah telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Kecamatan Rajapolah. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kecamatan Rajapolah mencakup penunjang urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,

koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Tasikmalaya adalah Misi ke 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Rajapolah dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Aspek kajian kelembagaan Kecamatan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa dari sisi budgeting alokasi anggaran Kecamatan berasal dari APBD Kabupaten/Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan. Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan kedudukan Kecamatan Rajapolah, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada Kecamatan Rajapolah, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Rajapolah tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan Kecamatan yang lainnya.

b. Aspek kajian dari sumber daya manusia

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi OPD Kecamatan Rajapolah bisa terwujud. Kemudian faktor yang mempengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai Kecamatan Rajapolah. Dalam upaya untuk memperkuat

kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.

c. Aspek kajian dari sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut aparatur Kecamatan Rajapolah harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah tidak memadai yang perlu untuk pengadaan baru sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat,

d. Aspek kajian dari jumlah anggaran

Kondisi sosiologis masyarakat Kecamatan Rajapolah yang bernuansa Kabupaten dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran Kecamatan, diharapkan dapat tercover untuk diimplementasikan di wilayah Kecamatan Rajapolah.

Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kecamatan Rajapolah sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain:

- Posisi Kecamatan Rajapolah yang berada di wilayah Kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan daerah dan pusat perdagangan dan jasa, sehingga sebagai wajah depan Kabupaten Tasikmalaya maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak

dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik Kabupaten,

- Kecamatan Rajapolah sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah yang menjadi parameter dinamika ekonomi Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan,
- Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka telah dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten diterapkan, maka diharapkan tidak terjadi ‘degradasi’ dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Rajapolah untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan goodgovernance.

Kecamatan Rajapolah merupakan salah satu OPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah

Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di Pusat Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial ekonomi

politik di Kecamatan Rajapolah akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Tasikmalaya.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Rajapolah membutuhkan sinergitas antara semua OPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Rajapolah sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk melihat Kecamatan Rajapolah secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD						REVISI HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
					PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kecamatan Rajapolah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rajapolah	Poin	65 (B)	2.283.881.119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Rajapolah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rajapolah	Poin	65 (B)	2.283.881.119	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	-	2.052.757.919	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	-	2.052.757.919	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	2.052.757.919	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	2.052.757.919	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan	31	76.187.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan	31	76.187.500	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	7	35.015.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	7	35.015.300	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.267.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.267.200	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.498.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.498.000	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Rajapolah	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Rajapolah	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12.500.000	

7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	19.907.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	19.907.000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rajapolah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	55.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rajapolah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	55.700.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12.900.000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Rajapolah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	44.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Rajapolah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	44.800.000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rajapolah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	97.235.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rajapolah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	97.235.700	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	84.003.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	84.003.500	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	4	13.232.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	4	13.232.200	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Rajapolah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	Poin	85,73	51.900.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Rajapolah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	Poin	85,73	51.900.000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	14.785.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	14.785.000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	14.785.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	14.785.000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	14.995.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	14.995.000	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	14.995.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	14.995.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Rajapolah	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	Laporan	1	22.120.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Rajapolah	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	Laporan	1	22.120.000	

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Rajapolah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	74.552.800	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Rajapolah	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	74.552.800	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	5	74.552.800	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	5	74.552.800	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	74.552.800	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	74.552.800	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rajapolah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rajapolah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Rajapolah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Rajapolah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	150	25.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	150	25.000.000	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Rajapolah	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	28.610.200	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Rajapolah	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	28.610.200	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Rajapolah	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	28.610.200	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Rajapolah	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	28.610.200	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	11	11.945.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	11	11.945.000	
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	11	16.665.200	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	11	16.665.200	
JUMLAH										2.463.914.119						2.463.914.119	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD yang terkait lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Rajapolah didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 dapat kita lihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Revisi Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya

KODE					PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN (Rp.)	CATATAN
1					2	3	4	5		6	7
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rajapolah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				
7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen RPTK	9.000.000	
7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12 Bulan	5.500.000	
7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12 Bulan	5.500.000	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%			
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Rajapolah	Persentase ASN penerima Gaji dan Tunjangan	%	14 Bulan	1.510.500.000	
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	Cakupan pelayanan administrasi umum	%			
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Rajapolah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12 Bulan	82.500.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Rajapolah	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12 Bulan	7.000.000	
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Rajapolah	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12 Bulan	13.865.000	
7	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Rajapolah	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	bulan	12 Bulan	5.400.000	
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Rajapolah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	bulan	12 Bulan	14.930.000	
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralata Rumah Tangga	Kecamatan Rajapolah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga secara lengkap	bulan	12 Bulan	26.000.000	

7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Rajapolah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	%			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Rajapolah	Tersedianya 3 Unit Laptop Setwan dan 3 Unit Printer	Unit	3 Unit	10.000.000	
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rajapolah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Rajapolah	Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	bulan	12 Bulan	18.000.000	
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Rajapolah	Jasa cleaning service	OB	1 Orang	2.300.000	
						Kecamatan Rajapolah	Jasa tenaga pengamanan	OB	4 Orang	24.500.000	
						Kecamatan Rajapolah	Jumlah tenaga administrasi	OB	1 Orang	41.000.000	
						Kecamatan Rajapolah	Jumlah tenaga Honorarium Pegawai Honoror Kategori II	OB	1 Orang	3.750.000	
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rajapolah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%			
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Rajapolah	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Unit	06 Unit / Tahun Bulan	82.620.000	
						Kecamatan Rajapolah	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tepat bayar pajak				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Rajapolah	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Rajapolah	Jumlah jenis pemeliharaan gedung atau bangunan	Jenis	12 Bulan	18.616.000	
						Kecamatan Rajapolah	Rehabilitasi Gedung Kantor, Ruamah Dinas dan Pemasangan Saung Garasi	3 Unit	12 Bulan	26.000.000	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Rajapolah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Rajapolah					
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Rajapolah	pelaksanaan rapat koordinasi rutin dan insidensial		12 Bulan	33.000.000	
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	Pelaksanaan pembinaan untuk Aparatur Desa/Kelompok Masyarakat		12 Kali	10.500.000	

7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Rajapolah					
7	01	002	2.02	001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tingkat Kecamatan		12 Bulan	15.500.000	
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	8 dokumen SPM Desa, sasaran penerima SPM di Kec. Rajapolah		12 Bulan	26.000.000	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Rajapolah			12 Bulan	15.500.000	
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Rajapolah					
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Rajapolah	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha yang ada di kecamatan		12 Bulan	21.300.000	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Rajapolah	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rajapolah					
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Rajapolah	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam bagi 8 Desa di Kec. Rajapolah		5 Kali	77.000.000	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rajapolah	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Rajapolah					
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Kecamatan Rajapolah	Terlaksananya Kegiatan PHBN dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di 8 Desa Wilayah Kec. Rajapolah		12 Bulan	31.000.000	
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Rajapolah	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	Kegiatan	5 Kali	78.500.000	
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	Kegiatan	12 Bulan	8.400.000,0	
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Rajapolah	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan				
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Rajapolah					
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Rajapolah	Tertibnya administrasi desa		12 Bulan	11.000.000	
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Rajapolah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di 8 Desa		12 Bulan	16.000.000	

BAB III

TUJUAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten Tasikmalaya jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Dalam proses mendukung kondisiter sebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawakearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari shopping list ke working plan.

Kecamatan Rajapolah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kabupaten. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi-instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Rajapolah di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Rajapolah yang meliputi sebagian prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang

dilaksananakan di Kecamatan Rajapolah telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Berdasarkan Tahapan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya adalah tahapan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja, adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember;
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan Kecamatan Rajapolah melaksanakan 2 (Dua) Urusan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rajapolah, sehingga program kegiatan di Kecamatan Rajapolah mendukung :
 1. Prioritas 1 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Rajapolah
 2. Prioritas 2 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rajapolah

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Rajapolah maka tujuan Rencana Kerja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 sesuai dengan visi Pembangunan Kecamatan Rajapolah adalah ***“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik”***. Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada tujuan dalam rencana kerja Kecamatan Rajapolah adalah ***“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Rajapolah, Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rajapolah ”***. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rajapolah 2025 beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran dijelaskan dengan target sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	Satuan	Baseline (2021)	REALISASI KINERJA PADA TAHUN KE-		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-			KONDISI AKHIR RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Rajapolah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	Poin	80,30	81,73	82,20	82,76	83,15	83,80	83,80
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rajapolah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rajapolah	Poin	54,05 (CC)	59 (CC)	60 (B)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	68 (BB)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DESA

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Desa

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Rajapolah tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Rencana Kerja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 mencakup 5 (Lima) Program dan 10 (Sepuluh) kegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA ;
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ;
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD Kecamatan Rajapolah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	100%	1.911.983.000	APBD		100%	1.910.972.000
7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	100%	20.000.000	APBD		100%	21.500.000
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	100%	9.000.000	APBD		100%	9.500.000
7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Rajapolah	100%	5.500.000	APBD		100%	6.000.000
7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rajapolah	100%	5.500.000	APBD		100%	6.000.000
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	Kecamatan Rajapolah	100%	1.510.500.000	APBD		100%	1511000000
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN penerima Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Rajapolah	100%	1.510.500.000	APBD		100%	1.511.000.000
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	Kecamatan Rajapolah	100%	149.695.000	APBD		100%	152.686.000
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Rajapolah	100%	82.500.000	APBD		100%	83.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Rajapolah	100%	7.000.000	APBD		100%	7.500.000
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Rajapolah	100%	13.865.000	APBD		100%	14.356.000
7	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Kecamatan Rajapolah	100%	5.400.000	APBD		100%	5.900.000

7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Rajapolah	100%	14.930.000	APBD		100%	15.430.000
7	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralata Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga secara lengkap	Kecamatan Rajapolah	100%	26.000.000	APBD		100%	26.500.000
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Kecamatan Rajapolah	100%	10.000.000	APBD		100%	0
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya 3 Unit Laptop Setwan dan 3 Unit Printer	Kecamatan Rajapolah	100%	10.000.000	APBD		100%	-
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rajapolah	100%	89.550.000	APBD		100%	92.050.000
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Kecamatan Rajapolah	100%	18.000.000	APBD		100%	18.500.000
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa cleaning service	Kecamatan Rajapolah	100%	2.300.000	APBD		100%	2.800.000
						Jasa tenaga pengamanan	Kecamatan Rajapolah	100%	24.500.000	APBD		100%	25.000.000
						Jumlah tenaga administrasi	Kecamatan Rajapolah	100%	41.000.000	APBD		100%	41.500.000
						Jumlah tenaga Honorarium Pegawai Honorer Kategori II	Kecamatan Rajapolah	100%	3.750.000	APBD		100%	4.250.000
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Rajapolah	100%	132.238.000	APBD		100%	133.736.000
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Kecamatan Rajapolah	100%	82.620.000	APBD		100%	83.120.000
						Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tepat bayar pajak	Kecamatan Rajapolah	100%		APBD		100%	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Rajapolah	100%	5.000.000	APBD		100%	5.000.000
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung atau bangunan	Kecamatan Rajapolah	100%	18.618.000	APBD		100%	19.116.000
						Rehabilitasi Gedung Kantor, Ruamah Dinas dan Pemasangan Saung Garasi	Kecamatan Rajapolah	100%	26.000.000	APBD		100%	26.500.000
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	100%	121.800.000	APBD		100%	124.800.000
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Rajapolah	100%	43.500.000	APBD		100%	44.500.000
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	pelaksanaan rapat koordinasi rutin dan insidental	Kecamatan Rajapolah	100%	33.000.000	APBD		100%	33.500.000

7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan pembinaan untuk Aparatur Desa/Kelompok Masyarakat	Kecamatan Rajapolah	100%	10.500.000	APBD		100%	11.000.000
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kecamatan Rajapolah	100%	57.000.000	APBD		100%	58.500.000
7	01	002	2.02	001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Rajapolah	100%	15.500.000	APBD		100%	16.000.000
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 dokumen SPM Desa, sasaran penerima SPM di Kec. Rajapolah	Kecamatan Rajapolah	100%	26.000.000	APBD		100%	26.500.000
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Rajapolah	100%	15.500.000	APBD		100%	16.000.000
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kecamatan Rajapolah	100%	21.300.000	APBD		100%	21.800.000
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha yang ada di kecamatan	Kecamatan Rajapolah	100%	21.300.000	APBD		100%	21.800.000
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Kecamatan Rajapolah	100%	77.000.000	APBD		100%	77.500.000
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Rajapolah	100%	77.000.000	APBD		100%	77.500.000
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam bagi 8 Desa di Kec. Rajapolah	Kecamatan Rajapolah	100%	77.000.000	APBD		100%	77.500.000
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kecamatan Rajapolah	100%	117.900.000	APBD		100%	118.900.000
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kecamatan Rajapolah	100%	117.900.000	APBD		100%	118.900.000
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan PHBN dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di 8 Desa Wilayah Kec. Rajapolah	Kecamatan Rajapolah	100%	31.000.000	APBD		100%	31.500.000

7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	Kecamatan Rajapolah	100%	78.500.000	APBD		100%	79.000.000
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	Kecamatan Rajapolah	100%	8.400.000,0	APBD		100%	8.400.000,0
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Rajapolah	100%	11.000.000	APBD		100%	11.500.000
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kecamatan Rajapolah	100%	11.000.000	APBD		100%	11.500.000
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tertibnya administrasi desa	Kecamatan Rajapolah	100%	11.000.000	APBD		100%	11.500.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2024 dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Rajapolah pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip service excellent, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Rajapolah,

Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

Rencana tindak lanjut dari program dan kegiatan Kecamatan Rajapolah adalah tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (good government) dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Rajapolah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Rajapolah ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di OPD Kecamatan Rajapolah serta partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait.

Rajapolah, Nopember 2024
CAMAT RAJAPOLAH



AGUNG NURBUDHIANSYAH, S.Sos.
NIP. 196601181993031004



KANTOR KECAMATAN
RAJAPOLAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN RAJAPOLAH**

Jl. Raya Rajapolah No. 220 Telp/Fax (0265) 421291 Tasikmalaya 46155

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Illahi Robbi, dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Kecamatan Rajapolah adalah sebagai dasar dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Rajapolah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rajapolah pada Tahun 2025.



Rajapolah, 23 Juli 2025
Camat Rajapolah

AGUNG NURBUDHIANSYAH, S.Sos.
NIP. 197608162006041018

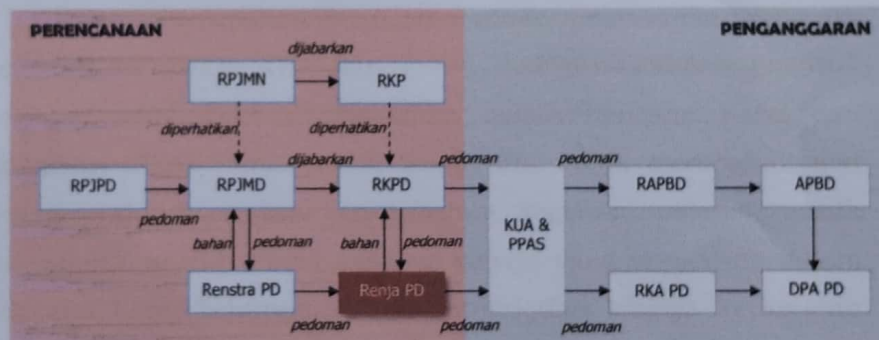
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 LANDASAN HUKUM	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	11
 BAB II 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN RAJAPOLAH TAHUN 2025	 12
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN RAJAPOLAH	22
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN RAJAPOLAH	23
 BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RAJAPOLAH	 29
 BAB IV PENUTUP.....	 36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah berupa dokumen rencana strategis (Renstra) maupun jangka pendek berupa dokumen rencana kerja (Renja). Selanjutnya dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya disebutkan bahwa Renstra dirumuskan kedalam rancangan Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta

membrikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Rajapolah, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Rajapolah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Rajapolah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Mendasari ketentuan Pasal 343 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD. Dalam Perubahan Renja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan pergeseran anggaran.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 serta evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Rajapolah sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Kecamatan Rajapolah Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun RKA-PD Tahun 2025. Dengan adanya acuan diatas, perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja

diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKAPD Tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Rajapolah Tahun 2025, merupakan Rancangan Perubahan rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya yakni **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. **Misi Ke 2** : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. **Misi Ke 3** : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. **Misi Ke 4** : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tema RKPD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 yaitu :

“Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah”

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah dan Penurunan Angka Prevalansi Stunting;
3. Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – pusat Pertumbuhan Ekonomi;
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;

6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peningkatan Kemandirian Desa;

Dengan demikian maka program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rajapolah menunjang program prioritas Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2024 Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24); dan
20. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0018 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Rajapolah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
RAJAPOLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN RAJAPOLAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN RAJAPOLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat salah satunya berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rajapolah ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Rajapolah selama Tahun 2025 tahun berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Rajapolah Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rajapolah dan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin dan kegiatan lainnya, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kecamatan Rajapolah, maka perlu adanya gambaran mengenai

kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Rajapolah untuk Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 3 Program 10 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.938.051.164,-. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Rajapolah selama Triwulan I masih belum menunjukkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia
2. Keterbatasan Anggaran

Tabel. 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : (IKU Perangkat Daerah)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Indikator Sasaran										Target 2025										Realisasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										63 Poin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										83,15 Poin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	SASARAN RENJIRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH/KECAMATAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN										REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						4		5		6		7		8		9		10		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	UNSUB WILAYAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	%	100	46.108.500	9.053.000	6.766.900	-	-	0	15819900	0	34
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	30.686.000	4.931.000	3.343.700	0	0	6	8274700	50	26.96571727
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket	12	3.053.500	822.000	873.200	0	0	6	1635200	50	55.5862027
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12.363.000	3.300.000	2.550.000	0	0	6	5850000	50	47.2956585
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	%	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
		Pengadaan Mebel	Unit	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6	Pengadaan Jasa Penunjang Usuan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan	%	0	68.900.000	10.474.327	6.983.631	-	-	0	17457958	0	25
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	13.700.000	3.674.327	1.057.079	0	0	6	4731406	50	24.01728334
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	43.200.000	6.800.000	5.926.552	0	0	6	12726552	50	25.86637561
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang usuan pemerintahan daerah	%	0	58.553.800	10.483.200	6.755.000	0	-	0	17238200	0	30
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	6	51.341.100	10.483.200	6.755.000	0	0	3	17238200	50	33.57582311
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	5.212.700	0	-	0	0	1	0	50	0

2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggara	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	49.170.000,00	9.238.650	9.238.650	0	18.78920073									
8		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rajapolah	Dokumen	36	21.980.000,00	0	4.430.400,00	10	5.138.750,00	0	-	0	-	10	9689750	28	44
		Koordinasi/Snergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Snergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	36,0	21.980.000	0	4.430.400	10	5.138.750	0	-	0	-	10	9689750	27,78	44,08166515
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0
9		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1,00	11.000.000	-	1.740.500	-	5.386.950	-	-	-	-	0	7127450	-	65
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	11.000.000	0	1.740.500	0	5.386.950	0	-	0	-	0	7127450	0	64,735
10		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	10	16.150.000,00	2	3.007.750,00	2	5.847.000,00	0	-	0	-	4	8854750	40	55
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang	Jumlah Dokumen yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Dokumen	10	16.150.000	2	3.007.750	2	5.847.000	0	-	0	-	4	8854750	40	54,6327165
3	Meningkatnya Kemandirian Desa di Wilayah Kecamatan Rajapolah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status D	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dokumen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
		Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan	Desa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

4	Meningkatnya Kondisi wilayah Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Persen	173.500.000	142.995.200	300.000	-	-	143.295.200	0	82.59089337
12		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum	Dokumen	5	173.500.000	300.000	-	-	143.295.200	-	83
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	-	-	-	-	0	0	0
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	173.500.000	300.000	-	0	143.295.200	0	82.59089337
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan	%	25.000.000	-	-	-	-	-	0	0
13		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan	%	25.000.000	6	0	0	6	0	25	-
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	24	25.000.000	1.947.000	-	6	1.947.000	25	7.788
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	0	-	-	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	-	-	-	-	-	-	-
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	23.515.000	16.114.850	2.617.000	-	-	18.731.850	0	79.65915373
14		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	23.515.000	16.114.850	2.617.000	0	0	18.731.850	0	80
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2,00	7.400.000	2.617.000	0	0	2.617.000	50	35.36486486
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	16.115.000	-	0	0	16.114.850	100	99.93906979
						1.918.051.164	307.915.566					
										Rata-rata capaian		0
										Predikat kinerja		Sangat Rendah
										Rata-rata capaian		20,40
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi
										Rata-rata capaian		37,81
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rajapolah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Rajapolah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut kami uraikan dalam Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya**

No	Indikator (IKU / SPM / IKK / SDG's)	Satuan	Target		Realisasi dan Proyeksi Realisasi		Analisis Capaian
			2024	2025	2024	2025	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Rajapolah	Poin	61,00	63,00	49,00	63,00	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	%	81,00	83,15	81,48	83,15	100%
3	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100%
4	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	100%
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100%

**2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya**

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Rajapolah tidak terlepas dari isu – isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi maupun isu – isu yang berasal dari permasalahan eksternal. Dari hasil analisis pelayanan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Kecamatan Rajapolah masih dalam alur yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Walaupun masih terdapat indikator yang masih dalam proses pencapaian target.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan mencakup berbagai aspek, mulai dari ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pemberdayaan masyarakat, hingga koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Beberapa isu yang sering muncul antara lain: belum optimalnya partisipasi masyarakat

dalam pembangunan, rendahnya kualitas perencanaan, masalah keamanan dan ketertiban, serta belum efektifnya koordinasi antar instansi.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rajapolah terkait dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, maka langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Sosialisasi dan Edukasi.
- b. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari tahap identifikasi masalah, penyusunan tujuan, hingga penentuan prioritas program. .
- c. Memperkuat peran aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak criminal.
- d. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah, baik secara formal maupun informal, serta memastikan adanya keselarasan dalam pelaksanaan program pembangunan.
- e. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada melalui Pendidikan dan pelatihan,

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RAJAPOLAH TAHUN 2025

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan (sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025). Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja berupa program, kegiatan serta subkegiatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan 1 Tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintahan Kecamatan Rajapolah merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Rajapolah Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional

kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Rajapolah.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Perubahan Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Sumber Dana	Catatn Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Unit Penanggung Jawab	
				Target 2025		Pagu Indikatif				Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD 2025						
KECAMATAN RAJAPOLAH								1.942.872.664	1.938.051.164	DAU		2.119.330.000	
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Rajapolah	Kec. Rajapolah	63 (B) Poin	10 orang	1.658.167.664	1.646.866.164	DAU		65 (B) Poin	1.764.830.000	Kec Rajapolah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai aturan	Kec. Rajapolah	10 orang	10 orang	1.475.303.864	1.475.303.864	DAU		10 orang	1.512.000.000	Kec. Rajapolah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rajapolah	10 orang	100%	1.475.303.864	1.475.303.864	DAU		100%	1.512.000.000	Kec Rajapolah	
	Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Kec. Rajapolah	100%	12 Paket	57.410.000	42.952.200	DAU		12 Paket	115.830.000	Kec. Rajapolah	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Rajapolah	12 Paket	12 Paket	30.686.000	33.623.700	DAU		12 Paket	84.000.000	Kec Rajapolah	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Rajapolah	12 Paket	12 Paket	3.146.000	3.053.500	DAU		12 Paket	8.500.000	Kec. Rajapolah	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Rajapolah	12 Paket			DAU		12 Paket	6.900.000	Kec. Rajapolah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rajapolah	12 Laporan	23.578.000	6.275.000	DAU		12 Laporan	16.430.000	Kec. Rajapolah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kec. Rajapolah	100%	68.900.000	73.525.000	DAU		100%	75.000.000	Kec. Rajapolah
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Rajapolah	12 Laporan	19.700.000	19.700.000	DAU		12 Laporan	20.000.000	Kec. Rajapolah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Rajapolah	12 Laporan	49.200.000	53.825.000	DAU		12 Laporan	55.000.000	Kec. Rajapolah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Rajapolah	100%	56.553.800	55.085.100	DAU		100%	62.000.000	Kec. Rajapolah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Kec. Rajapolah	6 Unit	51.341.100	53.085.100	DAU		9 Unit	57.000.000	Kec. Rajapolah

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kec. Rajapolah	2 Unit	2 Unit	5.212.700	2.000.000	DAU		3 Unit	5.000.000	Kec. Rajapolah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	Kec. Rajapolah	81,2	81,2	60.090.000	69.170.000	DAU		81,2	114.000.000	Kec Rajapolah
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rajapolah	2 Dok	2 Dok	25.000.000	21.980.000	DAU		2 Dok	27.500.000	Kec. Rajapolah
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rajapolah	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000	21.980.000	DAU		2 Laporan	27.500.000	Kec Rajapolah
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Rajapolah	1 laporan	1 laporan	15.000.000	11.000.000	DAU		1 laporan	25.000.000	Kec. Rajapolah

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rajapolah	1 laporan	100%	15.000.000	11.000.000	DAU	1 laporan	25.000.000	Kec. Rajapolah
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Rajapolah	100%	100%	20.090.000	36.190.000	DAU	100%	61.500.000	Kec. Rajapolah
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rajapolah	1 Dok	1 Dok	20.090.000	36.190.000	DAU	1 Dok	61.500.000	Kec. Rajapolah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rajapolah	100%	100%	173.500.000	173.500.000	DAU	100%	175.500.000	Kec. Rajapolah
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumentasi hasil koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rajapolah	100%	100%	173.500.000	173.500.000	DAU	100%	175.500.000	Kec. Rajapolah
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Rajapolah	100%	100%	173.500.000	173.500.000	DAU	100%	175.500.000	Kec. Rajapolah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kec. Rajapolah	100%	100%	25.000.000	25.000.000	DAU	100%	30.000.000	Kec. Rajapolah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	Kec. Rajapolah	100%	100%	25.000.000	25.000.000	DAU	100%	30.000.000	Kec. Rajapolah
Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kec. Rajapolah	100%	100%	25.000.000	25.000.000	DAU	100%	30.000.000	Kec. Rajapolah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rajapolah	100%	100%	26.115.000	23.515.000	DAU	100%	35.000.000	Kec. Rajapolah
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan Pengawasan	Kec. Rajapolah	100%	100%	26.115.000	23.515.000	DAU	100%	35.000.000	Kec. Rajapolah
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Rajapolah	10 Laporan	10 Laporan	10.000.000	7.400.000	DAU	10 Laporan	15.000.000	Kec. Rajapolah

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Rajapolah	1 Laporan	16.115.000	16.115.000	DAU	1 Laporan	20.000.000	Kec. Rajapolah
--	--	--	-------------------	--------------	------------	------------	-----	--------------	------------	-------------------

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Rajapolah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Rajapolah. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Rajapolah.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga **implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan**;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Rajapolah ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Rajapolah Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Rajapolah, 23 Juli 2025
Camat Rajapolah

AGUNG NURBUDHIANSYAH, S.Sos.
NIP. 197608162006041018